

Awas Buaya. Dinamika sosial politik tahun 1950-an dan 1990-an

Wawancara dengan (Interview with) Clifford Geertz oleh Baskara T. Wardaya

in: Wardaya, Baskara T. (red./ed.): *Membangun republik: bercakap tentang sejarah Indonesia bersama Sartono Kartodirdjo, Takashi Shiraishi, Benedict Anderson, George Kahim, Clifford Geertz, Daniel Lev, Goenawan Mohamad, dan Bill Liddle*. Galang Press etc., Yogyakarta/Jawa/IDN: ISBN 9786028174190, pp. 113-153.

online source:

[https://repository.usd.ac.id/12506/17/l.-Membangun Republik - turnitin.pdf](https://repository.usd.ac.id/12506/17/l.-Membangun-Republik-turnitin.pdf)

Using this text is subject to the general [HyperGeertz-Copyright](#)-regulations based on the Austrian copyright-law ("Urheberrechtsgesetz 1936", version 2018, par. 40h, par. 42), which - in short - allow a personal, nonprofit & educational (all must apply) use of material stored in data bases, including a restricted redistribution of such material, if this is also for nonprofit purposes and restricted to a specific scientific community (both must apply), and if full and accurate attribution to the author, original source and date of publication, web location(s) or originating list(s) is given ("fair-use-restriction"). Any other use transgressing this restriction is subject to a direct agreement between a subsequent user and the holder of the original copyright(s) as indicated by the source(s). HyperGeertz@WorldCatalogue cannot be held responsible for any neglect of these regulations and will impose such a responsibility on any unlawful user.

original copyright: Romo Dr. Baskara Tulus Wardaya, Universitas Santana Dharma, Yogyakarta/ IDN

Each copy of any part of a transmission of a HyperGeertz-Text must therefore contain this same copyright notice as it appears on the screen or printed page of such transmission, including any specific copyright notice as indicated above by the original copyright holder and/ or the previous online source(s).

BASKARA T. WARDAYA, SJ

(Editor)

MEMBANGUN REPUBLIK



Bercakap Tentang Sejarah Indonesia Bersama
**SARTONO KARTODIRDJO, TAKASHI SHIRAISHI,
BENEDICT ANDERSON, GEORGE KAHIN,
CLIFFORD GEERTZ, DANIEL LEV,
GOENAWAN MOHAMAD, DAN BILL LIDDLE**



Bab Lima

Awas Buaya!

Clifford Geertz

*Tentang Dinamika Sosial-Politik
Tahun 1950-an dan 1990-an*



DALAM WAWANCARA berikut Pak Cliff, begitu Dr. Clifford Geertz biasanya kami panggil, menekankan kenyataan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang bersifat majemuk. Menurutnya setiap upaya untuk mengurung kemajemukan itu ke dalam kerangka apa pun yang ketat—entah ideologi tinggi seperti yang dilakukan oleh Presiden Soeharto, atau nasionalisme seperti yang dilakukan oleh Presiden Sukarno, atau komunisme oleh Partai Komunis Indonesia, atau Negara Islam oleh kelompok-kelompok Islam—akan membawa ke bencana. Alasannya, menurut Pak Cliff, karena Indonesia terdiri dari begitu banyak macam orang.

Saat ditanya mengenai bagaimana mulai belajar tentang Indonesia, ia menjawab: “Ketika datang di Pare [Jawa Timur] saya tidak tahu apa pun tentang daerah itu. Baru kemudian setelah mulai memahami apa yang terjadi di sana, saya mulai melihat ke belakang, menelusuri sejarahnya,

Yang bisa dipelajari, kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk. Usaha apa pun untuk mengurungnya ke kerangka apa pun yang ketat ... akan membawa ke bencana. Karena Indonesia terdiri dari begitu banyak macam orang.

untuk mencari penjelasan mengapa begitu. Saya ingin mulai dengan segar dan bebas, tanpa pra-konsepsi apa pun". Siapa yang menurut Pak Cliff telah menjadi pelopor Revolusi Kemerdekaan Indonesia? "Bukan pemuda!" sergahnya. Menurut dia: "Kaum muda memang mulai memegang peranan penting. Tetapi mereka yang tampil kebanyakan datang dari kalangan intelektual. Saya juga tidak setuju dengan pandangan tentang revolusi sosial". Meskipun demikian, ia mengakui: "Tentu saja massa rakyat terlibat". Tentang berbagai studi mengenai revolusi, ia berpendapat:

"Tidak ada penjelasan sejarah yang tunggal". Menurutnya: "Untuk jangka waktu yang pendek revolusi memang mengaburkan kemajemukan". Selanjutnya, ia percaya bahwa segera setelah revolusi perpecahan akan terjadi: "Di balik rasa kesatuan yang mungkin tampak dari luar terdapat aneka macam kekuatan yang sudah bermain dan sulit didamaikan. Perpecahan menjadi semakin tampak pada masa pemerintahan multi-partai". Menurut pengamatannya: "Sama sekali tidak ada kerjasama antar-organisasi untuk mencapai tujuan bersama". Mengenai pengaruh kebudayaan ia mengatakan: "Saya tidak pernah melihat kebudayaan sebagai penyebab apa pun. Kebudayaan bukanlah semacam ultimate explanation untuk segala sesuatu yang terjadi".

Pak Cliff adalah peneliti tentang Indonesia yang pertama kali bicara soal ikatan primordial, yaitu ikatan berdasar hubungan darah, ras, bahasa, kedaerahan, agama dan adat. Apakah ikatan primordial itu merupakan "nasib"? Menurut Pak Cliff: "Sifat-sifat primordial merupakan hasil proses sejarah. Ikatan primordial bukan urusan instink, bukan nasib. Ia terbentuk dalam proses waktu, seperti halnya dengan kesetiaan dalam persahabatan, keanggotaan politik, dan sebagainya". Oleh karena itu, pesan Pak Cliff: "Kalian

harus menempatkan peristiwa yang terjadi di dalam konteks historis dan sosio-budaya”.

Wawancara yang laporannya akan segera Anda baca ini berlangsung di kampus Universitas Princeton, di New Jersey, Amerika Serikat, tempat dia mengajar, pada tanggal 14-15 April 1997. Aslinya wawancara berlangsung dalam bahasa Inggris, lalu kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Setelah diperiksa oleh Pak Cliff, hasil terjemahan itu dikembalikan lagi ke kami untuk kami proses selanjutnya.

Mengapa Tertarik Indonesia

T (Tanya): Mengapa Pak Cliff tertarik pada Indonesia? Dan mengapa ke Pare?

J (Jawab): He... he... he... Ini cerita awal dari karir saya sebagai antropolog. Ketika lulus college [perguruan tinggi] bidang utama saya bukan antropologi tetapi filsafat. Saya tidak tahu banyak tentang ilmu sosial. Kemudian saya ke [Universitas] Harvard, masuk ke “Social Relations Department”. Di sana saya mulai belajar sosiologi, psikologi klinis, psikologi sosial, antropologi dan sebagainya. Ketika saya harus menentukan tempat penelitian, pernah terpikir untuk pergi ke Brasilia.

Waktu itu saya juga bekerja pada proyek penelitian “American South-West”, mengolah data lapangan tentang suku-suku Indian Hopi, Zuni, serta “Spanish American”. Hasilnya belum pernah diterbitkan. Ketika saya sedang duduk di kantor, Professor Doug Oliver datang dan berkata: “Apakah kamu mau pergi ke Indonesia? Kami punya proyek penelitian di sana”. Tawaran itu saya bicarakan dengan Hilly [Hildred Geertz, istri Clifford Geertz, Ed.] dan akhirnya kami sanggupi.

Kami mulai belajar Bahasa Indonesia. Setiap akhir pekan, dari pagi sampai malam, kami mendapat pelajaran Bahasa Indonesia dari ahli linguistik dan beberapa orang Indonesia. Selain itu kami juga belajar Bahasa Belanda. Karena saya belum tahu apa pun tentang Indonesia, maka sedapat mungkin saya juga mulai membaca buku-buku tentang Indonesia. Waktu itu Indonesia belum banyak dikenal di Amerika. Kemudian saya pergi ke Leiden. Di sana saya bertemu dan berbicara dengan para Indonesianist. Kalau

kalian mau tahu lebih rinci tentang persiapan saya ke Indonesia ini, silahkan baca buku *After the Fact* [Geertz, 1995].

Pada tahun 1951 kami tinggal di Yogya [Yogyakarta] selama 8 bulan untuk belajar Bahasa Jawa. Rencananya kami harus menetap di Wonosobo. Tetapi kami berpendapat bahwa Wonosobo bukan tempat yang tepat untuk penelitian. Di sana tidak ada nasi. Kami pergi berkeliling ke Kertosono, Magelang, Jombang, Pare dan sebagainya. Akhirnya kami memutuskan untuk melakukan riset di Pare.

T: Setelah lebih dari 40 tahun mengenal Indonesia, bagaimana Pak Cliff merasakan hubungan Anda sebagai antropolog Amerika dengan orang-orang Indonesia?

J: Sekarang saya kenal banyak orang Indonesia dan mereka juga kenal saya. Situasinya sangat berbeda dengan ketika pertama kali saya datang ke sana, waktu saya masih harus belajar dari nol. Beberapa buku saya sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, ditanggapi, dikritik, diserang dan sebagainya. Ini baik. Sebab untuk itulah saya menulis. Dengan begitu saya memperoleh umpan-balik. Saya masih ingat ketika saya kembali lagi ke Pare pada tahun 1986. Waktu itu terjemahan *The Social History of an Indonesian Town* [Geertz, 1965] baru saja terbit. Dalam buku itu saya mengubah nama-nama orang di sana. Seorang yang dulu menjadi informan membaca buku tersebut, mengganti nama samaran ke nama sebenarnya, memfotokopi dan menyebarkannya ke teman-teman yang lain. Mereka semua saling memberi komentar satu sama lain. Tidak ada yang marah. Mereka senang.

Saya juga sempat bertemu dengan beberapa wartawan dari pers lokal maupun nasional. Mereka mempunyai pandangan kritis terhadap Pancasila serta terhadap pemerintah [Orde Baru, *Ed.*]. Tetapi para wartawan itu tidak berani memuat kritik mereka di koran mereka sendiri. Mereka ingin agar saya mau menyuarakan pandangan dan kritik mereka tersebut. Tentu saja saya hanya mau mengatakan apa yang memang ingin saya katakan, bukan apa yang mereka harapkan agar saya mengatakannya walaupun saya setuju dengan pendapat mereka. Seandainya waktu itu mereka mau untuk sedikit lebih terus terang, tidak terpaku pada agenda mereka sendiri, serta bersedia

menyajikan tulisan lebih dalam bentuk laporan dan bukan polemik, saya pasti tidak keberatan untuk menyampaikan pandangan saya.

T: Dalam tahun-tahun terakhir ini kami berusaha melihat kembali sejarah, politik, ekonomi dan kebudayaan Indonesia dengan mengadakan wawancara dengan para narasumber yang pernah mengadakan penelitian tentang sejarah, politik, serta politik ekonomi. Sekarang kami datang ke Pak Cliff dengan sejumlah pertanyaan tentang peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Pak Cliff bisa saja tidak setuju dengan pertanyaan yang sebelumnya sudah kami ajukan secara tertulis.

J: Soalnya bukan soal setuju atau tidak setuju. Pertanyaan-pertanyaan itu baik. Soalnya, saya bukan ahli sejarah. Pengetahuan saya tentang sejarah Indonesia ya dari buku-buku seperti yang kalian baca itu juga. Selain itu, tulisan saya tentang Indonesia hanya berkisar antara tahun 1951 dan 1986. Tahun 1996 saya pergi ke Indonesia, tetapi hanya sebentar. Karena itu saya tidak akan berbicara tentang hal yang saya sendiri tidak mengetahuinya. Saya tidak bisa mengoreksi hal yang tidak saya ketahui.

Masa Pra-Revolusi

T: Yang terutama ingin kami tanyakan kepada Pak Cliff adalah bagaimana kami bisa memahami perubahan sosial-budaya dalam sejarah Indonesia secara lebih baik. Misalnya saja tentang tokoh Kartini. Jika melihat pikiran-pikiran Kartini, apakah Pak Cliff melihat dia sebagai pelaku perubahan sosial-budaya yang cukup penting pada jamannya?

J: Tentang Kartini, persoalannya adalah sampai sejauh mana Kartini berperan penting dalam masyarakat pada jamannya. Kartini hanya terkenal dalam sumber-sumber Belanda. Pengaruhnya dalam masyarakat tidak begitu jelas. Saya belum pernah bertemu seorang pun di Indonesia yang tahu banyak tentang Kartini. Pada tahun 1950an memang ada sedikit acuan ke Kartini dalam gerakan wanita. Tetapi orang yang membaca buku tentang Kartini saya kira tidak banyak.

T: Pada awal abad ke-20 muncul banyak organisasi kemasyarakatan dan partai politik—Budi Utomo, Muhammadiyah, Sarikat Islam, Indische Partij,

dan sebagainya. Kesadaran akan pentingnya pendidikan berkembang terutama di kalangan priyayi Jawa. Berbagai kelompok masyarakat mengungkapkan pandangan dan sikap mereka dengan teknik-teknik modern. Mereka menggunakan rapat umum (rally), pemogokan, boikot, demonstrasi, surat kabar, serikat buruh, dan sebagainya untuk memobilisasi masa. Bagaimana situasinya pada waktu itu, sehingga kesadaran berorganisasi dan berpartai bisa tumbuh pesat?

J: Pendidikan pribumi sebenarnya belum tersebar luas, meskipun ada beberapa figur kritis dan terdidik yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Waktu itu banyak pengaruh luar yang masuk. Banyak misionaris yang didatangkan. Terjadi pula peristiwa penting di dunia internasional. Tahun 1905 Jepang mengalahkan Rusia. Tahun 1911 pemerintahan nasionalis Tiongkok berdiri. Hampir di seluruh dunia terjadi revolusi. Peristiwa-peristiwa itu tidak hanya berpengaruh di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain seperti India. Semacam tekanan dunia internasional mulai terbentuk untuk pertama kalinya.

Kegiatan dari berbagai organisasi dan partai pada tahun 1920an sebenarnya tidak terlalu hebat. Mereka semua organisasi yang legal. Mereka bukan gerakan massa rakyat. Sarikat Islam [SI] pernah menjadi populer untuk sementara waktu, [tetapi] kemudian cepat pecah. Sekurang-kurangnya di Jawa, SI pernah benar-benar menjadi organisasi massa, tetapi tidak lama. Sedangkan PKI pada waktu itu merupakan partai elite.

T: Mengapa SI berhasil menjadi partai massa, meskipun hanya sebentar?

J: Karena SI mendapatkan akar pada komunitas-komunitas dagang di Jawa Tengah, dan SI juga punya jaringan dengan pedagang-pedagang kecil. Pemerintah kolonial Belanda kadang-kadang bersikap lunak dan sering kali bersikap keras. Maka keberhasilan SI itu tidaklah besar dan juga tidak lama.

T: Tentang Pemberontakan PKI, apa yang terjadi pada tahun 1926?

J: Saya tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi pada tahun 1926. Sewaktu tinggal di Indonesia saya tidak mendengar apa-apa tentang peristiwa itu. Saya punya pengertian umum tentang apa yang terjadi pada masa kolonial.

Tetapi, seperti telah saya katakan, pengetahuan itu tidak berdasarkan penelitian khusus yang saya lakukan sendiri. Maka saya tidak bisa bicara banyak tentang masa kolonial.

T: Mungkin kita bisa bertolak dari pengertian umum Pak Cliff itu. Jika Pak Cliff meringkas apa yang Pak Cliff baca tentang masa kolonial dan kemudian memproyeksikannya ke hasil penelitian Pak Cliff pada tahun 1950an, apa komentar Pak Cliff tentang masa kolonial?

J: Itu sangat sulit. Ketika saya datang ke Indonesia pada tahun 1951, pengetahuan saya tentang Indonesia amat sedikit. Saya masuk ke dalam *Indonesian Studies* secara tiba-tiba. Di Belanda saya membaca beberapa buku sejarah, tetapi tidak menemukan hal-hal yang bermanfaat untuk tujuan penelitian saya. Saya tidak berusaha menggunakan bahan-bahan sejarah sebagai latar belakang penelitian. Saya ingin mulai dengan segar dan bebas, tanpa pra-konsepsi apa pun. Itulah salah satu keuntungan yang saya peroleh.

Ketika datang di Pare saya tidak tahu apa pun tentang daerah itu. Baru kemudian setelah mulai memahami apa yang terjadi di sana, saya mulai melihat ke belakang, menelusuri sejarahnya, untuk mencari penjelasan mengapa begitu. Jadi saya tidak mulai dengan Kartini atau peristiwa tahun 1926 atau apa yang terjadi pada jaman Politik Etis. Saya mengawali dengan mengamati „kota“ dan melihat kehidupan beragama di sana. Kemudian mencoba memahami fenomena yang saya amati, misalnya, mengapa terjadi perpecahan, bagaimana asal mulanya. Ringkasnya, saya melihat sejarah secara terbalik. Dari masa kini saya mencoba menelusuri apa yang terjadi sebelumnya.

T: Apakah pada tahun 1950an itu orang, khususnya pegawai negeri, berbicara tentang „Jaman Normal“? Adakah nostalgia tentang jaman itu? Apakah mereka juga berbicara tentang Digul?

J: Tidak. Di antara beberapa orang memang ada yang berbicara tentang Jaman Normal. Tetapi saya tidak melihat adanya nostalgia tentang jaman itu. Mereka juga tidak berbicara tentang Digul.

1

Revolusi Kemerdekaan

*T: Pak Cliff berbicara tentang Paijan dan Permai dalam tulisan „Ritual and Social Change: A Javanese Example” [Bab 6 dalam buku *The Interpretation of Cultures*, selanjutnya disingkat IOC, Ed.]. Pada tahun 1950-an bagaimana orang-orang di tempat tertentu, yang terpilah menurut aliran ideologis dan organisasi tertentu, melihat sejarah?*

J: Waktu itu ada macam-macam sumber pokok sejarah, dan semuanya tentang revolusi. Cerita-cerita tentang revolusi itu mulai berkembang tidak lama sebelum saya datang. Sebenarnya belum bisa disebut “sejarah” karena baru saja terjadi dan terasa sangat nyata. Interpretasi tentang apa yang baru saja terjadi pun kurang lebih masih sama. Perbedaan-perbedaan interpretasi muncul beberapa waktu kemudian. Masjumi dan PNI mulai memiliki penjelasan yang berbeda tentang apa yang terjadi pada masa lampau. Periode itu merupakan masa yang hebat. Orang bicara hal-hal yang besar dan tahu segalanya. Semua orang mengalami secara langsung perubahan-perubahan radikal. Gaya bicara Sukarno pun sangat radikal.

Orang berpikir bahwa mereka bukan saja telah tetapi juga akan mengalami perubahan besar yang terjadi dengan amat cepat. Muncul harapan bahwa anak-anak mereka tidak akan terbelakang. Ketika saya di sana pada tahun 1952-1953, terdapat banyak pendapat, aliran, partai. Periode menjelang Pemilu pertama tahun 1955 diwarnai dengan banyak debat yang sangat tajam. Yang terjadi adalah perpecahan internal di antara mereka sendiri. Pemahaman sejarah benar-benar memandang ke depan, tentang siapa yang akan membuat Indonesia mewujudkan mimpi-mimpi yang berkembang selama masa revolusi. Banyak ketegangan terjadi.

*T: Dalam studi tentang Revolusi Kemerdekaan, George Kahin [Nationalism and Revolution in Indonesia, 1952] memberi penekanan pada pentingnya peranan kaum intelektual seperti Sukarno, Hatta, Sjahrir, Amir Sjarifuddin, dan lain-lain. Sedangkan Ben Anderson [dalam buku *Revolusi Pemoeda*, 1972, Ed.] menekankan pentingnya peranan pemuda. Beberapa studi tentang revolusi sosial di daerah-daerah pada awal kemerdekaan—yang disunting oleh Audrey Kahin [Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan, 1985]—melihat revolusi kemerdekaan sebagai serangkaian revolusi sosial untuk mengganti*

elite yang sudah menjadi kaki-tangan pemerintahan kolonial selama jaman Belanda maupun jaman Jepang. Bagaimana Anda memahami Revolusi Kemerdekaan Indonesia?

J: Bukan pemuda! Kaum muda memang mulai memegang peranan penting. Tetapi *toh* mereka yang tampil kebanyakan juga dari kalangan intelektual. Saya juga tidak setuju dengan pandangan tentang revolusi sosial. Memang terjadi aksi-aksi atau pergolakan karena perasaan tidak puas, tetapi bukan revolusi sosial. Kalian harus ingat bahwa sebelum Revolusi Kemerdekaan, Jepang menduduki Indonesia selama tiga tahun. Selama waktu itu para intelektual Indonesia tampil ke muka, seperti juga terjadi sebelumnya. Saya tidak melihat bahwa pada waktu itu terjadi transformasi sosial. Saya setuju dengan George [Kahin], bahwa di sana peranan kaum intelektual penting.

T: Jika peranan kaum intelektual memang penting, mengapa mereka harus menunggu sampai tahun 1945? Bukankah kelompok-kelompok intelektual sudah muncul sekitar tahun 1930an?

J: Karena perang yang terjadi pada tahun 1945 menimbulkan kekosongan pemerintahan, dan para intelektual Indonesia mengisinya. Pada masa revolusi PSI [Partai Sosialis Indonesia] masih amat kecil. Tetapi pusat pemikiran politik Indonesia ada di PSI yang [memiliki cabang] di banyak tempat. Sebelum pendudukan Jepang, pemerintah kolonial Belanda mengontrol situasi dengan ketat. Dan setelah Jepang menyerah, aliran-aliran mencoba untuk muncul kembali. Pada periode seperti itu para intelektual memiliki pengaruh yang sangat besar, yang sebelumnya tidak mereka punyai. Sukarno dan Hatta sendiri *kan* termasuk intelektual?!

T: Bagaimana Pak Cliff melihat revolusi sebagai gerakan, jika tidak terjadi pengorganisasian secara massal?

J: Pada masa pendudukan Jepang, baik Sukarno maupun Masjumi mendapat dukungan untuk mengorganisasi massa. Pada waktu itu banyak organisasi massa muncul. Tetapi saya tidak melihat organisasi-organisasi itu sebagai “keturunan” dari macam-macam organisasi yang lahir sebelumnya. Pada masa perang dan sesudahnya organisasi-organisasi tersebut muncul sebagai kekuatan-kekuatan aktual. Apakah kalian berpendapat bahwa revolusi

kemerdekaan itu menampilkan kembali organisasi-organisasi massa yang lahir pada tahun 1920an?

T: Jika selama revolusi itu kaum elit memegang peranan penting, sejauh mana massa rakyat terlibat?

J: Tentu saja massa rakyat terlibat. Di sini saya hanya bereaksi melawan pemahaman bahwa ada revolusi rakyat bawah, dan revolusi itu merupakan kelanjutan dari gerakan rakyat tahun 1920an. Saya pikir, belakangan ini di Amerika pada khususnya, dan juga di Australia, berkembang pemahaman tentang sejarah dan politik Indonesia yang agak monoton dan sederhana. Ada satu versi tentang sejarah Indonesia. Kalian harus mempertanyakan secara kritis apa yang demi mudahnya akan saya sebut “Versi Cornell”. Saya tidak menganggap bahwa pandangan mereka salah. Tetapi jangan menelannya mentah-mentah.

T: Ha... ha... ha! Pada awal tahun 1950an revolusi baru saja terjadi dan, seperti Pak Cliff katakan, revolusi belum menjadi “fakta sejarah”. Di satu pihak semangat revolusi masih hidup dan di lain pihak, pada saat yang sama, orang sudah merasa kecewa dan tidak puas terhadap perkembangan keadaan. Bagaimana pada tahun 1950-an itu orang melihat revolusi?

J: Pada awal masa revolusi saya kira mereka berpikir semata-mata [tentang bagaimana bisa] bebas dari Belanda. Selain itu pada tahun-tahun pertama janji-janji revolusi begitu berlebihan. Terdapat rasa kesatuan. Tetapi ini tidak berlangsung lama. Tujuan untuk “bebas dari Belanda” tidak cukup untuk menggalang kesatuan. Untuk dapat bersatu, tidak cukup dengan hanya berkata “tidak menjadi Belanda”. Revolusi memang perjuangan melawan Belanda. Tetapi segera tampak bahwa rasa anti-kolonialisme saja tidak mencukupi untuk “menjadi Indonesia”. Penduduk Indonesia sangat majemuk. Ini baik, tetapi merupakan masalah.

Ini salah satu alasan mengapa saya menolak penjelasan “gerakan massa”. Indonesia memiliki kemajemukan sosial, ekonomi, budaya, agama, wilayah dan sebagainya. Ketika orang memutuskan mau menjadi Indonesia, muncul masalah kelas, agama dan sebagainya. Jadi apa yang terjadi selama

1

revolusi tidak bisa begitu saja dibingkai dalam kerangka gerakan massa. Tanpa bicara tentang daerah-daerah, kelompok-kelompok, sukubangsa dan sebagainya pada masa tahun 1920an, pada masa saya di sana, dan pada masa kini kalian tidak bisa memahami Indonesia.

Perbedaan dan Perpecahan

T: Menurut Anda, apakah dampak revolusi begitu kuat dan telah mengaburkan perbedaan-perbedaan?

J: Ya. Untuk jangka waktu yang pendek revolusi memang mengaburkan kemajemukan. Tetapi ini hanya terjadi di Jawa, terutama di Jakarta dan Yogya. Saya tidak tahu bagaimana di Luar Jawa. Begitu negara dibentuk, kemajemukan muncul kembali. Hampir semua negara mengalami itu. Di Indonesia masalahnya lebih rumit karena Indonesia merupakan negara kepulauan, di mana terdapat banyak suku bangsa, bahasa, agama dan sebagainya yang masing-masing mempunyai sejarahnya sendiri. Pada masa lalu Indonesia juga didatangi dan diduduki oleh orang-orang dari berbagai bangsa, seperti Belanda, Spanyol, Portugis, Amerika, Cina, [Arab] dan Jepang.

Begitu kompleksnya sehingga cerita sederhana apa pun tentang kebangkitan semangat nasional pada massa rakyat tidak bisa memberi penjelasan yang mencukupi. Tidak ada penjelasan sejarah yang tunggal. Saya bukan ahli sejarah. Saya juga tidak bisa memproduksi sejarah. Saya bisa bercerita tentang apa yang terjadi pada tahun 1950-an, dan sedikit tentang tahun 1960an, 1970-an, dan 1980-an. Cerita saya itu pun mungkin berbeda dari cerita-cerita yang pernah kalian dengar.

T: Kira-kira kapan perpecahan mulai muncul?

J: Segera sesudah mereka menentukan pilihan mengenai bentuk negara, waktu parlemen dibentuk. Atau bahkan perpecahan sudah terjadi selama revolusi. Tan Malaka dan kelompoknya menyerang kepemimpinan Sjahrir. Di tengah masa revolusi Sukarno diculik. Jadi di balik rasa kesatuan yang mungkin tampak dari luar terdapat aneka macam kekuatan yang sudah

bermain dan sulit didamaikan. Perpecahan menjadi semakin tampak pada masa pemerintahan multi-partai. Terjadi beberapa kali pergantian kabinet dan pada tahun 1958 muncul gerakan separatis. Itu semua terjadi begitu saja.

T: Jika yang terjadi pada waktu itu adalah perpecahan yang menegangkan, apa yang menjadi sumber konflik?

J: Bagi orang Kristen, sumbernya antara lain adalah agama. Meskipun itu bukan sumber yang besar. Mereka takut kalau Masjumi akan memperoleh mayoritas suara dalam Pemilu-1955 dan mengambil alih pemerintahan. Pada waktu itu semua orang mengira bahwa Masjumi akan menang.

T: Mengapa?

J: Antara lain karena Masjumi telah menjadi organisasi besar sejak jaman Jepang. Waktu itu PKI [Partai Komunis Indonesia] belum menjadi organisasi besar dan diduga tak akan berkembang menjadi besar. PNI [Partai Nasional Indonesia] diperkirakan tidak akan menjadi partai priyayi yang punya pengaruh dan bisa mendapatkan banyak suara. Sebab pada dasarnya PNI adalah partai kelas. Jadi, hanya Masjumilah yang waktu itu dikira akan meluas ke seluruh kepulauan Indonesia. Masjumi sudah kuat di Jawa. Ternyata Masjumi tidak mendapatkan mayoritas suara dalam Pemilu-1955. Banyak orang heran pada hasil Pemilu. Mereka heran karena besarnya persentase suara yang diperoleh PKI (16%), dan kenyataan bahwa Masjumi hanya mendapatkan 21% suara. Sedangkan PNI memperoleh 22% dan NU mendapatkan 18%. Harapan bahwa Pemilu-1955 akan menghasilkan konsensus ternyata tidak terwujud. Bahkan Pemilu malahan semakin memperdalam perpecahan. Di tingkat lokal tidak ada mayoritas yang mencolok bagi siapa pun.

Ketika orang mulai melihat bahwa PKI itu sebenarnya kuat, muncullah kepanikan. Pada waktu itu pengaruh Perang Dingin yang melibatkan AS, Uni-Soviet, dan Cina juga terasa di Indonesia. Tetapi yang terutama menimbulkan ketegangan adalah perpecahan dari dalam, perbedaan pandangan tentang arah yang hendaknya diambil oleh Indonesia. Setiap kelompok atau aliran berpikir bahwa masing-masing mendapatkan peluang untuk memperoleh

kekuasaan. Sama sekali tidak ada kerjasama antar-organisasi untuk mencapai tujuan bersama

1 Tahun 1950-an

T: Mengapa saat itu orang memilih partai tertentu dan tidak memilih partai yang lain?

*J: Itu pertanyaan yang bagus. Di Jawa dan Bali pilihan atas suatu partai sejalan dengan pengelompokan dalam masyarakat yang sudah ada sebelumnya. Saya menguraikan itu dalam *The Social History of an Indonesian Town*. Di sana saya mencoba menunjukkan perpecahan yang tampak jelas antara kelompok “modern” dan “kolot”, antara santri dan priyayi, antar-kelas, antar-agama dan sebagainya. Saya tunjukkan pula bahwa dalam hal ini pemilihan yang berlangsung pada tingkat lokal menjadi contoh kasus yang amat bagus. Situasinya amat kompleks.*

Sekurang-kurangnya saya mendiskusikan perpecahan itu di suatu tempat yang konkret, bagaimana orang mengambil keputusan memilih partai. Secara umum pilihan diambil menurut pengelompokan yang sudah ada sebelumnya. Kadang-kadang memang ada yang memilih suatu partai karena memiliki semacam hubungan historis dengan pemimpin-pemimpinnya. Misalnya ada banyak pengikut setia Sukarno yang masuk PNI. Mereka masuk PNI karena Sukarno, bukan karena alasan ideologis. Di Bali pengelompokan yang muncul setelah revolusi dan pada tahun 1965 sama dengan pengelompokan yang terjadi pada tahun 1906 ketika Bali ditaklukkan Belanda. Perpecahan di Bali sudah berlangsung lama, lebih lama daripada yang muncul di Jawa. Saya masih ingat, suatu kali saya bertanya kepada induk-semang saya, mengapa dia menjadi anggota Partai Sosialis. Dia menjawab dengan memberi alasan ideologis sekitar perikemanusiaan. Kemudian saya mengemukakan fakta bahwa semua kerabatnya juga menjadi anggota Partai Sosialis. Di Partai Sosialis tidak ada orang yang bukan kerabatnya. Mendengar perkataan saya itu, dia hanya tersenyum. Ringkasnya, menjadi anggota dari suatu partai merupakan urusan kelompok. Ketika saya kembali lagi ke Bali setelah pembunuhan massal 1965, semua pembunuhan

terungkap sebagai perselisihan antar-kelompok, bukan dalam kelompok. Dan perselisihan itu sudah berlangsung sejak lama.

T: Apakah pada waktu itu negara samasekali tidak berperan dalam mempengaruhi atau memaksa orang untuk memilih salah satu partai?

J: Tidak. Saya kira pada waktu itu tak seorang pun dipaksa masuk ke suatu partai, terutama oleh negara. Sukarno sendiri tidak pernah benar-benar berdiri di belakang PNI. Pada tahun 1950-an negara tidak memaksa orang untuk memilih partai tertentu karena, untuk sebagian, Sukarno tidak menghendaknya. Secara sosial, pada waktu itu kelompok-kelompok yang besar mempunyai ikatan ke dalam yang amat kuat. Muhammadiyah sangat penting sebagai bagian dari Masjumi dan anggotanya sudah lama tinggal di sana. NU memiliki jaringan pesantren yang amat luas, dengan para kyai dan santri-santrinya. Orang tidak dipaksa oleh negara, tetapi oleh tekanan lokal atau tekanan kelompok sebaya. Pada waktu itu negara tidak memiliki identifikasi partai. Setiap orang bisa mengungkapkan pikiran secara terbuka.

T: Bagaimana dengan peranan militer?

J: Mereka memang ada di tingkat lokal, seperti sekarang ini, tetapi tidak mengambil peran politik yang jelas. Polisi berperan penting terutama dalam menjaga keamanan. Politik lokal benar-benar penuh gairah. Pada waktu itu orang Indonesia belajar bagaimana berpolitik dan menjadi politisi. Ada kebebasan pers. Ada multi-partai. Setiap aliran atau sub-aliran memiliki surat kabar. Dan orang-orang di kota membacanya.

Orang-orang yang menduduki jabatan Camat atau Wedana merupakan figur yang sangat populer. Mereka tahu apa yang harus dilakukan dan mempunyai kontak yang akrab dengan rakyat. Mereka berkunjung ke desa-desa, berbicara dengan kyai, berbicara dengan lawan politik, seperti politisi Amerika berkaliber dunia. Meskipun ada ketegangan dan konflik, untuk beberapa lama politik tingkat lokal sangat hidup. Para pemimpin lokal membangun demokrasi—dalam arti penuh—yang terbuka dan fleksibel. Saya kenal seorang Wedana, seorang warga setempat yang menjadi pengikut setia Sukarno. Dia mengenal setiap penduduk di wilayahnya. Dia benar-benar

mengenai situasi. Rata-rata pemimpin pada waktu itu memang seperti dia. Secara keseluruhan, pada waktu itu dinamika politik lokal di sana lebih tinggi daripada di sini [di Amerika, *Ed.*]. Saya sangat terkesan.

T: Apa cita-cita yang ingin mereka capai dalam berpolitik?

J: Mereka punya pandangan yang berbeda-beda. Secara umum, mereka ingin Indonesia menjadi negara modern seperti negara Barat, mempunyai sistem pendidikan yang lebih baik, ada kesempatan kerja. Tetapi di dalamnya ada macam-macam pandangan. Akhirnya persoalan-persoalan tidak bisa dipecahkan oleh politik lokal. Skalanya menjadi besar, tak bisa diatasi secara lokal lagi.

T: Menurut Anda apakah kebudayaan mempunyai peranan tertentu?

J: He... he... he! Saya baru saja baca komentar Dan [Daniel] Lev dalam wawancara tentang Demokrasi Terpimpin. Omong kosong, katanya, kalau kesalahan atau kelemahan dalam Demokrasi Terpimpin itu terjadi karena pengaruh kebudayaan. [Menurut saya] kebudayaan memang bukan penyebab. Tetapi peristiwa-peristiwa pada tahun 1950an itu terjadi dalam kerangka kebudayaan. Memang benar, seperti dia katakan, itu semua terjadi melulu karena orang memilih dan membuat keputusan tertentu.

Namun ada sesuatu yang khas "Jawa" dalam politik Jawa, khas "Perancis" dalam politik Perancis, dan khas "Amerika" dalam politik Amerika. Pilihan itu bukanlah semata-mata pilihan acak dari orang-orang tertentu. Peristiwa-peristiwa yang terjadi tak bisa dijelaskan dengan cara seperti itu. Ini tidak berarti bahwa kekuatan sosial-ekonomi tidak menjadi masalah atau tidak berperan. Tetapi semua yang terjadi itu berlangsung dalam suatu kerangka kebudayaan tertentu. Selama ini saya tidak pernah melihat kebudayaan sebagai penyebab apa pun. Tetapi saya tak bisa mengerti bagaimana bisa memahami politik Jawa tanpa memahami kebudayaan Jawa, politik Indonesia tanpa mengerti Indonesia, politik Amerika tanpa memahami Amerika.

Untuk memahami apa yang terjadi, apa saja yang dilakukan orang di sana, dan mengapa mereka melakukan ini atau itu, kalian harus memahami

apa makna yang mereka lakukan itu bagi diri mereka sendiri. Apa kerangka makna yang mereka gunakan. Jika seseorang mengatakan, “Saya tidak suka padanya karena alasan-alasan politik”, kalian harus menemukan penjelasan tentang apa yang menjadi alasan politik tersebut. Kalian tidak bisa mengatakan bahwa dia semata-mata memutuskan untuk tidak suka atau itu semata-mata pandangan pribadinya sendiri. Apalagi di Bali, di mana kelas terpecah menurut struktur sosial. Orang mengelompok menurut hubungan kekerabatan. Pengelompokan itu bukanlah melulu hasil pilihan bebas.

Kalian tidak bisa memahami politik di Indonesia tanpa melihat perbedaan-perbedaan agama, etnik, ras, dan sebagainya. Konflik-konflik sudah ada di sana. Jika kalian hendak memahami suatu peristiwa tertentu, misalnya Pemilu, kalian harus menempatkan peristiwa Pemilu itu dalam kerangka makna yang digunakan oleh para pelakunya untuk mengkonsepsi, melihat dan memahami peristiwa itu. Kalian juga harus melihat bagaimana para pelaku itu memahami diri mereka sendiri. Itulah cara bagaimana saya menggunakan konsep kebudayaan. Kebudayaan bukanlah semacam “*ultimate explanation*” untuk segala sesuatu yang terjadi.

T: Bagaimana Pak Cliff memahami Pemilu tahun 1955, tahun 1957, dan dibatalkannya Pemilu tahun 1959?

J: Saya tidak tahu banyak tentang tahun 1959. Pada tahun 1958 saya memang di Minangkabau, tetapi pada tahun 1959 saya sudah kembali ke Amerika. Tentang tahun 1955 sudah banyak saya ceritakan di muka. Saya kira setelah tahun 1955 itu Orde Lama sebenarnya sudah berakhir. Antara tahun 1955 dan tahun 1965 terjadi banyak peristiwa yang menimbulkan rasa panik, dan ini memuncak pada tahun 1965. Pada tahun 1957 jumlah pemilih PSI di Bali merosot. Secara umum, setelah tahun 1955 orang berpikir bahwa bencana akan terjadi. Pada tahun 1960an ketegangan muncul dalam bentuk rapat umum, kerusuhan, dan sebagainya.

T: Bagaimana kelompok-kelompok besar seperti PNI, Masjumi dan PKI memainkan peranannya dan bagaimana orang di pedesaan memahami atau memecahkan masalah politik yang mereka hadapi?

J: Ada empat kelompok besar di Pare, yaitu PNI, Masjumi, NU dan PKI. Pada mulanya politik di tingkat lokal berjalan dengan baik. Ketika ketegangan memuncak, politik lokal semakin sulit dikendalikan. Hampir setiap orang condong ke partai dan terpolitisir.

T: Bagaimana Pak Cliff menjelaskan kaitan antara politik lokal dan politik nasional?

J: Ketika Pemilu 1955 semakin dekat, semakin banyak pula politisi nasional datang ke Pare, berpidato, dan mengadakan rapat umum. Banyak pemimpin partai yang berkampanye. Sekitar 50 organisasi, yang satu sama lain saling berhubungan —entah erat atau tidak— bergiat aktif dalam politik. Pers sangat bebas. Orang tahu benar apa yang sedang terjadi. Mereka membaca koran. Ketegangan meningkat. Para pemimpin lokal tidak lagi bisa mengontrol situasi. Tidak berarti bahwa mereka tersingkir. Tetapi mereka berada di bawah bayang-bayang pemimpin tingkat nasional. Situasinya “me-nasional”.

T: Bagaimana partai-partai dan organisasi-organisasi itu membiayai kegiatan mereka?

J: Secara nasional saya tidak tahu. Di tingkat lokal, ada orang setempat yang menjadi penyandang dana. Masjumi dibiayai oleh pedagang besar yang punya toko atau bekerja di pasar. NU dibiayai oleh petani kaya, meskipun tidak ada yang benar-benar kaya. Mereka punya tanah luas dan memberi dana pada pondok-pondok pesantren. Yang memberi dana pada PKI, saya tidak tahu. Kebanyakan anggota PKI miskin, tetapi mereka punya serikat buruh. Sedangkan kebanyakan anggota PNI adalah pegawai. Saya tak tahu secara rinci. Tetapi mereka punya sumber dana untuk membiayai jalannya organisasi. Pada waktu itu dana yang diperlukan untuk kegiatan organisasi sebenarnya tak begitu banyak.

T: Pak Cliff berkata bahwa pilihan ke suatu partai sejalan dengan perpecahan yang sebelumnya sudah ada dalam masyarakat. Kami ingin minta penjelasan yang lebih rinci mengenai pengelompokan sosial itu.

J: Saya sudah menjelaskan itu dalam *The Religion of Java* [Geertz, 1960]. Sangat kompleks, tidak bisa disederhanakan begitu saja. Tetapi di Jawa pada

umumnya Masjumi adalah partainya para wiraswasta kecil dan beberapa petani kaya, khususnya yang sudah banyak mendapat pengaruh kota. NU, seperti telah saya katakan, punya basis di pondok pesantren, di jaringan masjid, pengajian dan sebagainya. Pendukung PKI biasanya orang yang bekerja di jawatan kereta api, buruh pabrik gula. Sedangkan PNI terdiri dari para birokrat dan para [penganut] kejawen.

T: Bagaimana Pak Cliff melihat perubahan dari Demokrasi Parleментар ke Demokrasi Terpimpin?

J: Menjelang perubahan itu terjadi, seperti telah saya katakan, setiap orang, termasuk Sukarno, khawatir dan takut bila bangsa terpecah. Sukarno berusaha keras, dengan susah payah dan frustrasi, untuk menstabilkan pemerintahan, mengatasi pertentangan antar-partai, antar-etnik, dan sebagainya. Tetapi setelah Pemilu tahun 1955 usaha itu pada dasarnya tidak efektif lagi. Pilihan yang tersedia baginya adalah membubarkan partai-partai atau melakukan sentralisasi kekuasaan untuk dapat mengontrol partai. Itulah situasi yang membawa ke pilihan Demokrasi Terpimpin. Hal ini dengan mudah dapat dimengerti.

Keputusan memilih Demokrasi Terpimpin tidak diambil karena melihat kenyataan bahwa Pemilu-1955 tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi pilihan tersebut memperjelas perpecahan yang ditimbulkan oleh Pemilu. Ketika kabinet yang stabil tak dapat tercipta, Sukarno mencoba bekerjasama dengan orang yang tak berpartai. Harapannya, konflik antar-partai bisa diredakan. Ternyata tidak bisa jalan juga.

T: Selama tahun 1956-1959 anggota Konstituante hasil Pemilu-1955 mengadakan sidang selama 3 tahun, berusaha merumuskan UUD. Perdebatan selama 3 tahun itu dikenal dengan nama "Debat Konstituante". Menurut Pak Cliff, "By the time of the Constitutional Convention of 1957, the Pantjasila had changed from a language of consensus to a vocabulary of abuse, as each faction used it more to express its irreconcilable opposition to other factions than its underlying rules-of-the-game agreement with them, and the Convention, ideological pluralism, and constitutional democracy collapsed in a single heap" [IOC, h 226]. Tetapi menurut studi Adnan Buyung Nasution, "Debat Konstituante" itu justru menunjukkan kesungguhan untuk menciptakan

1

negara yang berdasarkan hukum. Debat itu juga menunjukkan kesungguhan untuk menghormati hak-hak asasi manusia.

J: Tentu saja ada orang-orang dalam Konstituante —yang berhaluan PSI, Masjumi, PNI, dan lain-lain— yang punya keprihatinan pada hukum dan berusaha untuk kembali ke *civil society* lagi. Tetapi debat itu sendiri malahan mengkristalkan perpecahan yang pada tahun 1955 sudah tampak. Ada berbagai macam pandangan tentang Pancasila yang tak terdamaikan. Ketegangan antara berbagai macam kelompok ideologis, aliran, sudah begitu tinggi dan tak bisa ditawar-tawar lagi. Debat Konstituante merupakan kesempatan terakhir untuk saling berunding, dan ternyata gagal. Betul-betul gagal. Itulah yang saya maksud dengan pernyataan tersebut.

T: Berulang-ulang Pak Cliff menekankan pentingnya tahun 1955. Pak Cliff juga melihat periode akhir dari tahun 1950-an sebagai pra-kondisi peristiwa tahun 1965. Di sini kami melihat adanya paradoks. Pemilu merupakan salah satu manifestasi demokrasi dalam negara modern. Tetapi Pemilu juga menjadi saat-saat di mana orang semakin menyadari adanya perpecahan dalam masyarakat. Bagaimana Pak Cliff menjelaskan hal ini.

J: He... he... he! Kalau saya banyak bicara sekitar 1955, itu karena [periode] itulah yang paling banyak saya ketahui. Persoalannya menjadi lebih umum. Ada paradoks, ada masalah, dan saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Lihat saja apa yang baru saja terjadi di Algeria. Sebelum Pemilu mereka tidak pernah benar-benar mengalami malapetaka. Sebelumnya mereka [berada] di bawah pemerintahan otoriter. Ketika mereka mulai melakukan liberalisasi dalam Pemilu, situasinya menjadi tidak dapat diatur lagi.

Pada suatu saat dalam sejarah Pemilu dapat membuat keadaan semakin bertambah buruk. Bukannya saya anti-demokrasi atau anti-Pemilu. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa salah satu hal yang diakibatkan oleh Pemilu adalah munculnya perbedaan-perbedaan. Jika perbedaan-perbedaan itu tak tertampung dalam struktur pemerintahan dan struktur sosial budaya, maka kekacauan akan terjadi. Di Algeria, jika mereka membiarkan pemerintahan sebelumnya tetap berlangsung, yang terjadi mungkin lain. Saya tidak tahu. Pemilu menggoyahkan tatanan, baik dari kiri mau pun kanan.

Itulah mengapa pemerintah Indonesia sekarang melakukan kontrol ketat. Mereka tidak mau terlalu banyak hal terjadi. Ini juga terjadi di Maroko. Sejarah Pemilu di Dunia Ketiga memang demikian. Tentu saja ada beberapa kekecualian. Masalahnya, bagaimana dapat menyelenggarakan Pemilu yang bebas dan sementara itu masih dapat menampung ketegangan luar biasa yang terjadi dalam masyarakat. Inilah yang harus dicari pemecahannya bila mau mengembangkan demokrasi. Pemilu di Amerika pun menimbulkan ketegangan. Tetapi setidaknya-tidaknya sampai sekarang masih ada semacam kerangka untuk menampungnya.

Pemilu bukan sekedar alat politik dalam arti sempit untuk memilih siapa yang akan memegang pemerintahan. Pemilu juga dapat menjelaskan tentang apa yang sedang dan mungkin terjadi. Di Indonesia Pemilu-1955 merupakan Pemilu yang pertama, Pemilu nasional yang bebas, dengan partai yang bebas dan orang-orang yang bebas untuk mengatakan apa yang ingin mereka katakan. Sukarno selalu menunjuk liberalisme dan demokrasi konstitusional sebagai ancaman terhadap sistem pemerintahan yang baru. Demikian pula Soeharto, meskipun untuk sebagian menggunakan alasan filosofis.

Pembunuhan Massal 1965

3

T: Ketika menyadari semakin dalamnya perpecahan akibat Pemilu, bagaimana orang di tingkat lokal melihat perbedaan-perbedaan dan mengatasi akibatnya?

J: Segera sesudah Pemilu selesai, banyak orang merasa takut bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Pemilu tidak menghasilkan stabilitas sebagaimana diharapkan oleh setiap orang. Orang kemudian berpikir tentang siapa yang nantinya akan berkuasa. Apakah tentara? PKI? Kelompok Islam? Dan sebagainya. Waktu itu kekuatan mereka masih kurang lebih seimbang. Perselisihan antara kekuatan-kekuatan yang ada semakin tajam sampai menjelang tahun 1965. Rasa takut, marah, benci terungkap di mana-mana.

T: Jadi ketakutan yang muncul waktu itu bukan karena kuatir kalau PKI menjadi mayoritas tetapi karena perpecahan yang memang sudah ada dalam masyarakat?

J: Bagi sejumlah orang, terutama bagi santri atau orang Masjumi, ketakutannya memang kemudian menjadi ketakutan terhadap PKI. Tetapi pada mulanya tidak demikian. Ketakutan pada PKI muncul kemudian. Pada awal tahun 1960an PKI berkembang sangat pesat, terutama di Jawa. Jika ada Pemilu lagi, banyak orang khawatir bahwa PKI akan menang. Bahkan Sukarno pun takut pada PKI, karena tidak bisa mengendalikannya lagi. Demokrasi Terpimpin merupakan salah satu cara untuk mengontrol PKI.

T: Akhirnya pembunuhan massal terjadi pada tahun 1965. Bagaimana Pak Cliff memahami apa yang terjadi pada tahun 1965?

J: Saya kira kalian dapat mengambil 1965 sebagai ledakan dari konflik dan ketegangan. Tetapi sekurang-kurangnya sejak dua tahun sebelumnya, seperti yang saya dengar dari banyak orang, sudah terjadi banyak teror di tingkat lokal. Sudah terjadi banyak kekerasan, poster-poster, serangan antar-kelompok. Ketika Gerakan 30 September terjadi situasi tegang sudah siap meledak. Jadi tahun 1965 menjadi klimaks.

T: Menurut Pak Cliff, ledakan itu terjadi semata-mata akibat ketakutan yang sudah ada di antara macam-macam kelompok, atau di antara elite, atau kombinasi antara keduanya?

J: Saya kira akibat ketakutan yang mencekam massa rakyat. Di Jawa Timur, ketakutan sudah tersebar luas dalam masyarakat. Tentu saja ada ketakutan di kalangan elite juga. Hampir setiap orang terlibat. Banyak kerusuhan. Di desa terjadi *popular killing*.

T: Dalam pembunuhan massal, menurut Pak Cliff, apakah yang terjadi pada waktu itu perkelahian antara dua kelompok yang kekuatannya seimbang, atautkah untuk sementara PKI mungkin berusaha melawan dan kemudian mereka menjadi korban?

J: Suasana pada waktu itu penuh ketakutan dan panik. Hampir di setiap tempat orang tidak tahu siapa yang akan menang. Meskipun akhirnya di mana-mana yang menang selalu pihak tentara. Pada waktu itu ada banyak orang dalam organisasi-organisasi aliran yang condong ke PKI. [Tapi] tidak berarti bahwa mereka itu komunis.

Dalam pembunuhan massal tidak jelas siapa saja yang terlibat. Tahu-tahu orang saling membunuh. Itulah yang terjadi. Jika kalian mengamati masing-masing kejadian itu, sangat sulit untuk melihat bahwa mereka itu dikoordinir. Tentu saja mereka dihasut.

T: Di Jawa Tengah pembunuhan massal terjadi pada minggu ketiga bulan Oktober 1965, tiga minggu kemudian baru meluas ke Jawa Timur, dan bulan Desember baru terjadi di Bali. Pembunuhan besar-besaran hanya terjadi setelah kehadiran RPKAD di tempat-tempat itu.

J: Yang terjadi di Pare orang saling bunuh-bunuhan. Sangat mengerikan. Selama beberapa waktu tentara membiarkan. Baru kemudian mereka menghentikannya. Tetapi sejauh mana peranan tentara itu, saya tidak tahu.

T: Mengapa pembunuhan yang terjadi di Jawa Barat tidak meluas?

J: Mungkin karena perpecahan di sana tidak begitu tajam. Tetapi saya tidak tahu persis bagaimana keadaannya.

T: Bagaimana orang memilih sasaran pembantaian dan pembenaran apa yang mereka gunakan untuk menjelaskan tindakan mereka sebagai sesuatu yang dapat terjadi pada waktu itu?

J: Mereka memilih berdasarkan perbedaan latar belakang yang memang sudah ada. Ini tidak hanya terjadi dalam semalam. Di Pare perpecahan tajam sudah berkembang sekurang-kurangnya lima atau enam tahun [sebelumnya]. Maka masing-masing pihak sudah tahu musuh mereka. Pembenaran utama yang mereka gunakan, seperti dikatakan kepada saya, “Jika saya tak membunuhnya maka dialah yang akan membunuh saya”. Situasinya sangat kacau. Saya berbicara dengan banyak orang di sana. Kata mereka, pada waktu itu emosi orang sudah begitu tinggi dan mereka kalut. Seorang eks-Masjumi bercerita bahwa beberapa orang malahan membunuh teman sendiri. Jadi kebencian memang sudah ada di sana setelah revolusi, dan memuncak setelah tahun 1955.

T: Bolehkah kami minta penjelasan lagi mengenai bagaimana para pemimpin atau organisasi-organisasi di Indonesia berusaha mengatasi perpecahan yang dirasakan jelas sejak tahun 1955? Jika perpecahan itu bukan karena kegagalan

mereka, di mana letak akar masalahnya? Selanjutnya, apa yang dapat kami pelajari dari periode itu?

J: Yang bisa dipelajari, kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk. Usaha apa pun untuk mengurungnya ke kerangka apa pun yang ketat—entah ideologi tinggi seperti dilakukan Soeharto, atau nasionalisme seperti dilakukan oleh Sukarno, atau Partai Komunis, atau Negara Islam atau lainnya—akan membawa ke bencana. Karena Indonesia terdiri dari begitu banyak macam orang.

Yang mungkin didapat dari pengalaman Orde Lama dan juga Orde Baru, kalian dapat mempersatukan Indonesia dengan cara seperti yang digunakan Jepang. Macam-macam orang harus diterima, diakui dan dihargai. Yang harus dihargai bukan hanya perbedaan etnik, tetapi juga perbedaan kelas dan sejarah. Saya tidak mau berkotbah. Karena semuanya merupakan usaha. Demokrasi merupakan usaha, Pancasila merupakan usaha. Tetapi satu hal yang harus tidak dilakukan atau dikurangi [menjadi] sesedikit mungkin adalah usaha menyeragamkan. Setiap daerah punya kekhasannya sendiri-sendiri.

Tahun 1950-an merupakan masa yang menjanjikan. Ada kreativitas di sana. Saya telah bicara tentang perkembangan politik lokal yang sangat mengesankan, perkembangan budaya yang luar biasa, dan daya hidup Indonesia pada tahun 1950-an dan 1960-an. Dan semua itu masih ada di sana sekarang, walau pun muncul dalam bentuk lain. Misalnya, bagaimana kelompok-kelompok seni di sekolah menampilkan semacam „politik kuasa”. Jadi masih banyak vitalitas dan kemampuan yang ada di sana.

1

Nasionalisme Radikal

T: Kami masih ingin bertanya sekitar periode 1950-an. Ada loncatan pertambahan jumlah suara yang diperoleh PKI dalam Pemilu. Di Jawa persentase suara PKI dalam Pemilu-1957 naik 37% lebih tinggi dari yang didapat dalam Pemilu-1955. Apakah kenaikan persentase ini masih dapat dijelaskan dengan mengacu pada perpecahan antar-aliran? Selanjutnya, pada tgl 5 Juli 1959 Konstituante dibubarkan dan rencana Pemilu-1959 dibatalkan.

Jika Pemilu-1959 diadakan dan Konstituante tidak dibubarkan, apakah Peristiwa 1965 akan tetap terjadi juga?

J: Oh, saya tidak tahu, saya tidak dapat mengatakannya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalian akan dapat menjawab pengandaian seperti itu. Saya kira banyak hal perlu diperhitungkan untuk dapat mencegah terjadinya Peristiwa '65. Kesalahan yang dilakukan PKI pada tahun 1957-58 dan seterusnya tidaklah spektakuler. Dan konsep tentang "aliran" tidak dimaksudkan sebagai usaha untuk menjelaskan sebab-sebab terjadinya peristiwa apa pun. Konsep itu semata-mata merupakan usaha untuk menggolongkan kekuatan-kekuatan aktual yang hidup dan bermain dalam masyarakat.

Yang muncul setelah Pemilu 1955 di Jawa adalah semacam nasionalisme radikal yang romantis. Para nasionalis radikal itu mengaitkan diri dengan Sukarno. Mereka membentuk kekuatan lokal untuk mendapatkan kekuasaan. Orang-orang yang sebelumnya memilih PNI waktu itu beralih ke PKI. Dengan perkataan lain, PNI "kiri" berpindah ke PKI. Mereka lebih sebagai nasionalis radikal daripada sebagai komunis. Nasionalisme radikal menjadi sumber gairah politik yang sudah meluas ke mana-mana.

Pertumbuhan nasionalisme radikal itu dipersubur oleh runtuhnya ekonomi, situasi Perang Dingin yang semakin menekan, perjuangan merebut Irian, ketegangan dengan Amerika dan sebagainya. Jadi untuk memahami Peristiwa '65 harus mengetahui situasi yang mendahuluinya. Sebab suatu reaksi massa yang luar biasa telah terjadi. Reaksi massa itu tidak hanya terjadi selama September-Desember 1965 dan Januari 1966, tetapi telah mulai sekurang-kurangnya dua atau tiga tahun sebelumnya. Ada Aksi Sepihak, ada kerusuhan, perpecahan dan radikalisasi dalam PNI. Posisi Sukarno pun semakin tidak pasti. Semuanya bercampur-baur.

Saya kira kalian harus melihatnya lebih dalam kerangka tumbuhnya nasionalisme radikal itu daripada mencari akar penyebabnya pada PKI. Kalau banyak orang kemudian condong ke PKI, maka yang berkembang bukanlah Marxisme ilmiah, tetapi Marxisme romantis. Jadi sistem aliran sudah berada dan berakar di sana. Itulah yang telah saya coba untuk melukiskannya. Ada

aliran-aliran. Bahwa aliran-aliran itu berubah, itu memang benar. Bahkan berubah dengan amat cepat.

T: Lalu bagaimana kekacauan itu masih dapat dijelaskan dengan mengacu pada latar belakang struktur sosial yang sudah terbentuk lama sebelumnya?

J: Pada waktu itu organisasi-organisasi massa sudah mengambil peran. Misalnya, peran SOBSI [Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia] amat penting. Banyak organisasi baru muncul, dan peranan surat kabar juga penting. Meskipun demikian saya tidak melihat perubahan struktural yang luas, yang penting. Memang ada perubahan. Tetapi kebanyakan hanyalah perubahan perimbangan kekuatan antara kelompok-kelompok yang bertikai. Perubahan terjadi, tetapi pola umum tidak berubah banyak. Masjumi sudah pudar, meskipun masih kuat di luar Jawa.

T: PKI memperoleh pertambahan jumlah suara. Pertanyaannya, mengapa pada waktu itu orang memilih PKI? Ini masih berkaitan dengan pertanyaan mengapa orang memilih partai.

J: Banyak orang memilih PKI. Tetapi sebenarnya orang tidak ingin mengarah ke sana. Waktu itu PNI sangat lemah dan terpecah. Sukarno tidak pernah jelas posisinya, apakah dia mendukung PNI atau tidak. Kecondongan ke PKI itu merupakan cerminan sayap kiri nasionalisme Indonesia. Saya kira tidak terlalu sulit untuk memahaminya. Kemiskinan di Jawa Tengah dan Jawa Timur amat parah.

Pada tahun 1957 saya tiba di Jakarta dari Padang, waktu itu saya datang dari Pantai Barat. Ketika mau berangkat ke Bali saya tidak mendapatkan tempat duduk di pesawat karena pesawatnya digunakan untuk mengangkut lembaran-lembaran uang rupiah. Ini salah satu pertanda bahwa situasinya memang sudah buruk. Untuk pertama kalinya banyak petani tampil ke muka, walaupun belum begitu termobilisasi. Pada waktu itu mungkin mereka sudah bergabung ke PKI. Namun demikian mereka bergabung ke PKI bukan karena pilihan bebas. Ada kekuatan yang menekan orang-orang di pedesaan. Tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki pilihan apa pun. Tetapi mereka tidak membuat pertimbangan untuk menentukan pilihan yang rasional.

Sangat sulit melukiskan kembali kepahitan yang terjadi setelah tahun 1956 sampai awal tahun 1960-an. Di Bali PSI, yang sebelumnya amat populer, ditinggalkan oleh para pendukungnya dan tidak punya kekuatan lagi. Sebaliknya, nasionalis radikal, yaitu PNI “kiri”, semakin mendapat banyak pengikut. PKI dan organisasi-organisasi yang bukan partai juga menarik banyak massa. Kelompok-kelompok itu semuanya muncul dari aliran yang kemudian berkembang cepat.

Awal Orde Baru

T: Setelah pembunuhan massal 1965 masyarakat Indonesia sangat ketakutan untuk berpolitik. Ketakutan dilembagakan dengan screening bersih lingkungan, bersih diri, litsus alias penelitian khusus, wajib lapor untuk bekas tapol, kartu penduduk yang dicap ET, dan sebagainya. Sekitar satu juta orang menjadi tahanan politik selama belasan tahun. Untuk masyarakat dilaksanakan politik “Massa Mengambang”. Dwi Fungsi ABRI menjadi sangat dominan dalam bidang politik. Kegiatan politik hanya terjadi di lapisan sangat elite. Misalnya dalam Peristiwa 15 Januari pada tahun 1974 dan aksi-aksi mahasiswa pada tahun 1974 dan 1978. Aksi-aksi itu pun dihentikan dengan politik NKK/BKK sejak tahun 1978.

Tampak ada kemiripan antara masa sesudah Revolusi 1945 dan masa sesudah tahun 1965. Pada kedua masa itu ada “sesuatu” yang dapat mengaburkan perbedaan-perbedaan. Setelah Revolusi ‘45, “sesuatu” itu adalah “harapan”, sedangkan setelah tahun 1965 “ketakutan”.

J: Yang muncul setelah tahun 1965 tidak hanya ketakutan tetapi juga harapan. Terutama di kalangan elit di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya ada harapan untuk dapat memperoleh kehidupan ekonomi yang lebih baik.

T: Apakah ada kesamaan harapan antara sesudah Revolusi ‘45 dan sesudah tahun 1965?

J: Pada fase-fase pertama sesudah tahun 1965 situasi ekonomi setidaknya dapat terkontrol. Nilai rupiah mulai stabil. Hal ini membuat orang merasa bahwa pemerintahan telah dijalankan dengan benar. Stabilisasi ekonomi mendapat pengutamakan dan sistem politik yang berjalan mendukung terciptanya perkembangan ekonomi. Tingkat kemiskinan

menurun. Ada cerita sukses di sana. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa rejim tidak mendapat dukungan rakyat. Pada waktu itu tingkat korupsi juga lebih rendah daripada sebelumnya, walaupun kemudian naik lagi. Kekerasan telah berlalu. Situasi menjadi lebih tenang. Jadi dalam hal ini, seperti setelah Revolusi '45, ada harapan bahwa situasi akan menjadi lebih baik.

T: Pemerintah Orde Baru telah berperan dalam melembagakan baik harapan baru maupun ketakutan akan screening bersih lingkungan, litsus, tapol, dan bertambahnya peranan tentara. Bagaimana menurut pendapat Anda?

J: Setelah beberapa lama mungkin muncul ketidakpuasan yang semakin besar dan meluas. Ini normal. Sebab korupsi semakin merajalela, pemerintah semakin otoriter, campur tangan militer dalam politik dan ekonomi semakin besar, ada masalah tapol [tahanan politik, *Ed.*] di Buru dan sebagainya. Ini semua menjadi semakin muncul ke permukaan.

Tetapi sejauh mana ketidakpuasan itu benar-benar telah meluas di Jawa, saya tidak tahu... Saya tidak merasa bahwa orang-orang di Jawa, khususnya rakyat kebanyakan —bukan intelektual— peduli dengan itu semua. Mereka tidak tahu banyak tentang apa yang sedang terjadi. Saya kira kalian lebih tahu tentang hal ini daripada saya.

Pada tahun 1986 saya kembali ke Pare. Waktu itu saya tidak mendengar apa pun tentang Timor Timur [Timor Leste, *Ed.*] dan tapol. Orang tidak bicara lagi tentang pembunuhan massal 1965. Dan saya juga tidak merasakan adanya perasaan tidak puas yang meluas. Dari segi ekonomi Pare benar-benar telah banyak berubah. Kehidupan ekonominya lebih dinamis. Orang tidak begitu berpikir tentang politik. Mereka berpikir tentang masalah jual-beli di pasar, dagang kecil-kecilan dan sebagainya. Meskipun masih banyak hal-hal politik yang dibicarakan, saya tidak merasakan adanya ketidakpuasan yang benar-benar mengganggu.

T: Apakah Pak Cliff tidak merasa aneh bahwa dalam waktu singkat orang tiba-tiba lupa akan pembunuhan massal?

J: Mereka sama sekali tidak lupa! Persoalannya, pembunuhan massal 1965 membuat mereka tidak menyukai politik terbuka. Mereka tidak ingin berpolitik lagi. Mereka tidak menginginkan segala sesuatu yang dapat

menimbulkan kekacauan dan kekerasan. Reaksi kebanyakan orang terhadap pembunuhan massal 1965 menjadi sangat berlebihan. Kegiatan-kegiatan politik dan partai dilihat sebagai pembawa kehancuran. Jadi seperti mereka katakan, “Di masa lalu kami telah mengalami semua emosi kampanye yang meledak-ledak, unjuk rasa dan pemogokan, kebangkitan komunis dan sebagainya yang akhirnya bermuara pada pembunuhan massal 1965. Kami tidak menginginkan itu lagi”. Baik Sukarno maupun Soeharto melihat partai-partai politik, debat politik terbuka, dan konflik-konflik sebagai pembawa malapetaka.

1

Upaya Penyeragaman

1

T: Sejak tahun 1996 mulai banyak terjadi aksi-aksi berbaur SARA. Bulan Oktober 1996 terjadi Peristiwa Situbondo, bulan Desember Peristiwa Tasikmalaya. Pada bulan Januari 1997 terjadi bentrokan besar antara Suku Dayak dan Madura di Kalimantan Barat, bulan Februari terjadi Peristiwa Rengasdengklok. Jika Pak Cliff membaca berita-berita internet, Pak Cliff akan mengamati wacana (discourse) tentang serangan kepada pihak etnis lain dan agama lain. Apakah Pak Cliff melihat munculnya wacana seperti itu pada tahun 1950-an?

J: Pada tahun 1950-an memang ada kelompok Islam yang melakukan serangan semacam itu. Ada banyak ungkapan anti-Cina yang amat kuat. Mengenai wacana anti-Kristen/Katolik pada waktu itu, saya tidak ingat lagi. Seperti saya katakan, orang Kristen/Katolik kuatir akan dominasi Masjumi. Tetapi seingat saya tidak ada konflik yang benar-benar buruk antara orang Kristen/Katolik di satu pihak dan orang Islam di lain pihak, seperti yang terjadi [tahun 1996] di Situbondo dan Tasikmalaya. Tentang yang terjadi di Situbondo dan Tasikmalaya sendiri saya tidak tahu secara rinci. Sejauh saya ingat, sebelumnya belum pernah terjadi konflik antar-umat beragama yang berskala nasional seperti itu. Sedangkan perpecahan yang terjadi pada tahun 1950an lebih karena respons pada kondisi-kondisi lokal.

T: Jika dibandingkan antara situasi tahun 1950-an dan pertengahan 1990-an ada perbedaan tentang bagaimana orang menafsirkan apa yang terjadi di sekitar mereka. Pada pertengahan 1990an meskipun peristiwanya terjadi

di Situbondo atau Tasikmalaya, orang menafsirkan adanya campur tangan dari pemerintah. Ada sesuatu yang datang dari pusat, dan peristiwa-peristiwa itu lebih merupakan bagian dari politik nasional daripada respons terhadap dinamika lokal.

J: Tentang itu saya tidak tahu banyak dari tangan pertama. Ketika saya datang lagi ke Pare pada tahun 1986 itu, hal demikian tidak tampak. Sebab waktu itu memang tidak terjadi kerusuhan. Memang posisi-posisi penting dalam pemerintahan lokal telah ditempati oleh militer. Masyarakat mengeluh soal korupsi dan pengelolaan jalur beras di Bulog. Dan di situ bisa dilihat tangan-tangan militer dan pemerintah pusat. Tetapi pada waktu itu di Pare tidak ada ekspresi politik yang terang-terangan, walaupun mungkin banyak ketidakpuasan. Tidak ada oposisi politik. Polisi yang ada di Pare pun masih polisi lokal.

¹ *Salah satu hal yang kami lihat dalam tulisan Pak Cliff yang berjudul “Popular art and the Javanese tradition” (Indonesia, No. 50, Th. 1990) adalah cara yang ditempuh negara untuk dapat benar-benar memainkan peranan penting pada tingkat lokal. Kami melihat bagaimana negara mendominasi macam-macam acara di tingkat lokal.*

J: Saya tidak menolak pendapat itu. Tetapi dalam tulisan itu saya juga menunjukkan bahwa dominasi negara tidaklah tanpa perlawanan. Unsur-unsur tradisional ada dalam acara kesenian, pengajian, pidato, kotbah, perpisahan di sekolah dan sebagainya. Di sana terdapat pula ungkapan perlawanan. Saya mencoba memberi beberapa contoh bagaimana politik lokal tampil dalam bentuk seni. Itu muncul dalam acara perpisahan di SMA, acara pemerintah dengan wejangan Pancasila, dan sebagainya. Saya tidak menyangkal bahwa kehadiran pemerintah sangat sentral. Tetapi saya mencoba menunjukkan bahwa dalam lingkungan yang tampaknya secara politik amat homogen, dalam kenyataannya tidak demikian. Bahwa pemerintah dan militer menghendaki Jawa dan Indonesia homogen, itu masalah lain. Tetapi apakah itu tercapai? Saya tidak yakin.

Di Pare saya merasakan adanya perlawanan dan kemerdekaan yang ingin diungkapkan. Saya mencoba menyingkap makna politik lokal NU yang disampaikan lewat kotbah, pidato, pengajian, pondok. Di sekolah juga

muncul budaya kaum muda, seperti yang ditampilkan dalam kaset, radio, televisi dan sebagainya. Sekali lagi, kehadiran negara yang dikuasai militer memang kelihatan jelas. Hal ini tampak dalam spanduk-spanduk penuh slogan yang dipasang di sepanjang jalan, penentuan hari libur umum, serta kontrol nasional. Tetapi salah satu bagian dari tulisan itu ingin mengatakan bahwa apa pun yang dikehendaki negara agar dilaksanakan, dan sejauh mana itu telah dapat dilaksanakan, masih mengundang perlawanan. Dan perlawanan itu masih akan terjadi di masa yang akan datang.

T: Bagaimana Pak Cliff menafsirkan perlawanan tersebut? Apakah itu melawan birokrasi, atau kebijakan politik, atau hegemoni negara?

J: Untuk sebagian memang perlawanan terhadap hegemoni. Tetapi perlawanan itu lebih mengacu pada masih hidupnya keyakinan akan nilai-nilai yang mereka miliki sebelumnya. Jadi apakah itu nilai-nilai yang diyakini NU, eks-Masjumi, Muhammadiyah, priyayi, dan sebagainya? Masing-masing dari mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana keindonesiaan hendaknya diwujudkan. Di sini muncul kembali persoalan bahwa masyarakat Indonesia itu majemuk. Pemerintah pusat tetap tidak berhasil dalam melaksanakan homogenisasi. Dan situasi yang homogen memang tidak akan terjadi.

T: Menurut Pak Cliff apakah gerakan LSM [Lembaga Swadaya Masyarakat] selama ini merupakan bagian dari perlawanan semacam itu?

J: Sejauh menyangkut Indonesia, saya tidak tahu. Saya kira LSM merupakan bagian dari gerakan yang jauh lebih besar, akibat perubahan politik dunia pada akhir abad-20 dan awal abad-21. Meskipun kemunculan LSM itu merupakan gejala yang penting untuk dicermati, tetapi itu bukan satu-satunya. Banyak hal lain yang terjadi. Misalnya, konflik nasional dan pertikaian antar-etnik yang timbul sebagai bagian dari paradoks ketegangan globalisasi. Ini terjadi di Kanada, Yugoslavia, Srilanka, dan sebagainya.

Saya mempunyai rencana untuk menulis apa yang terjadi di Jerman dan Austria. Tahun depan saya akan ke Jerman. Saya akan berusaha mengamati apa yang sedang terjadi pada negara, kebudayaan, dan nasionalisme di dunia sekarang.

T: Menurut Pak Cliff apakah LSM itu menjadi gerakan berbasis massa?

J: Beberapa LSM memang tampaknya begitu. Saya tidak tahu.

T: Keputusan pemerintah untuk membredel majalah Tempo, Editor, dan Detik pada tahun 1994 dilawan dengan aksi-aksi jalanan. Bagaimana Pak Cliff menafsirkan perlawanan terhadap pembredelan dan penekanan beberapa media massa waktu itu?

¹ J: Tentu saja saya tidak tahu apa yang terjadi ketika Tempo dibredel. Saya tidak tahu bagaimana reaksi massa pada waktu itu. Saya yakin bahwa di Jakarta dan di beberapa kota seperti Yogya dan Solo reaksinya amat keras. Tetapi saya tidak tahu.

T: Apakah pada tahun 1950an pemerintah, baik pusat maupun daerah, banyak bercampur tangan dalam media massa?

J: Ya, tetapi tidak banyak. Ada serangan-serangan kepada pers pada tahun 1950-an. Abadi dilarang oleh Sukarno, saya kira. Beberapa surat kabar PSI setidak-tidaknya di bawah tekanan. Tetapi sejauh saya ingat semuanya itu tidak dilakukan secara sistematis. Larangan biasanya hanya berlaku sementara, 2-3 bulan.

T: Usaha "nation building" dan proyek kebudayaan nasional banyak didominasi oleh kebudayaan Jawa. Bagaimanakah dampak kebudayaan Jawa pada politik Indonesia?

J: Bahwa sekarang ini orang Jawa berperan besar dalam masyarakat nasional Indonesia, itu karena faktor latar belakang sejarah. Sejak jamannya J. P. Coen sampai sekarang segalanya terpusat di sana. Pemerintahan kolonial didirikan di sana. Nasionalisme untuk sebagian besar muncul di Jawa, meskipun muncul juga di Sumatra Barat dan tempat-tempat lain. Proporsi jumlah penduduk Jawa yang lebih besar dari proporsi di pulau-pulau lain juga mempunyai sejarahnya yang panjang. Jadi ini bukan hasil dari konspirasi dari beberapa orang. Oleh sebab itu persoalannya adalah apa yang perlu dilakukan berkenaan dengan hal ini.

Sekarang ini tersebar pendapat bahwa Soeharto akan men-Jawa-kan seluruh bangsa. Kekhawatiran akan dominasi orang Jawa di Indonesia

semakin bertambah. Selain itu masalah internal juga memunculkan tuduhan akan adanya kebijakan neo-kolonial “*devide et impera*”. Perpecahan terasa sangat nyata, jauh lebih besar daripada sebelumnya. Terjadi semakin banyak ketegangan karena Indonesia lebih terpilah-pilah daripada sebelumnya. Pada periode awal kemerdekaan, ketika saya di sana, tidak banyak hal yang terjadi di luar Jawa—terutama dibagian timur Indonesia. Sekarang banyak peristiwa terjadi di sana.

Namun demikian sekarang ini orang membicarakan masalah „Jawanisasi“ secara lebih terbuka. Terjadi banyak diskusi tentang hal itu. Ini dapat menjadi gejala yang sehat, tergantung bagaimana menangannya.

Federalisme

T: Bagaimana orang pada tahun 1950-an memahami nasionalisme?

J: Mereka semua sangat antusias. Pemerintahan federal—Republik Indonesia Serikat—bentukan Belanda dibubarkan. Mereka melihat RIS sebagai usaha Belanda untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Saya tidak tahu, apakah bentuk negara federal sebenarnya merupakan pola yang lebih baik untuk Indonesia. Tetapi orang pada waktu itu baru saja lepas dari penjajahan Belanda, sehingga yang berkembang adalah nasionalisme radikal. Tidak ada kemungkinan sedikit pun untuk mendiskusikan sistem federal sebagai bentuk negara karena sistem itu telah digunakan oleh Belanda. Jadi reaksi terhadap Belanda pada waktu itu tidak memungkinkan orang untuk memilih bentuk federal. Saya tidak tahu sekarang!

T: Apakah sistem federal merupakan bentuk yang paling tepat untuk Indonesia?

J: Saya tidak mengatakan itu. Saya tidak tahu apakah itu yang paling tepat. Saya bukan filsuf. Yang saya katakan, bentuk federal itu tidak mungkin diperdebatkan pada waktu itu. Kalian tidak bisa menjadi sekaligus seorang federalis dan nasionalis pada saat yang bersamaan. Tidak ada yang membela sistem federal. Semua bercita-cita membentuk sistem kesatuan republik. Saya sebenarnya tidak menemukan sesuatu yang salah pada sistem federal. Mungkin Indonesia dapat mempertimbangkan itu lagi. Hanya saja pada

tahun 1950an sistem federal ini tidak mungkin didiskusikan. Sebab bergabung dengan Republik merupakan satu-satunya cara untuk menjadi patriotik. Mungkin saja sekarang ini orang bisa berbicara secara lebih terbuka tentang kemungkinan sistem federal di Indonesia.

Awat Buaya!

T: Dalam tulisan berjudul *"The politics of meaning"*, bab 11 buku *The Interpretation of Cultures (IOC)*, tentang Pembunuhan '65 Pak Cliff menulis, *"The crocodile is quick to sink, they say, but slow to come up."* (hlm 324). Walaupun airnya kelihatan tenang tetapi ada buayanya. Dan Pak Cliff juga mengatakan *"As the consequences of the last decade appear in the next..."*. (hlm 326). Akibat pembunuhan massal '65 ini mungkin akan muncul kembali di kemudian hari. Sementara itu, *"we can only wait for the crocodile..."*. (hlm 326). Apa yang Pak Cliff maksud dengan "buaya" pada tahun 1965 dan apa yang Pak Cliff maksud dengan "buaya" sekarang ini?

J: Itu usaha saya untuk melukiskan adanya banyak hal yang sedang terjadi. Lebih banyak daripada yang kalian pikirkan. Banyak persoalan politik yang masih ada di sana dan belum terpecahkan. Pemerintah pusat masih harus menekan sesuatu yang tidak bisa terus-menerus ditekan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam suksesi. „Buaya“ masih di sana, mencoba memberi makna pada perasaan orang. Seperti telah saya katakan, di sana terdapat kemajemukan, perpecahan dan ketegangan. Tidak peduli pada usaha apa pun yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menyelubunginya. Saya pikir sangat aneh kalau ilmuwan politik Barat melihat Orde Baru sebagai hasil konstruksi internal yang terpisah dari Orde Lama, sehingga ada pemilahan yang tajam antara keduanya. Memang ada perbedaan antara Orde Baru dan Orde Lama, tetapi ada lebih banyak kesinambungan.

T: Dapatkah Pak Cliff menyebutkan unsur-unsur yang menunjukkan kesinambungan itu?

J: Saya kira Soeharto telah melanjutkan apa yang sebenarnya diinginkan Sukarno. Sukarno menginginkan rejim seperti [yang diciptakan oleh Soeharto]. Dia ingin agar partai-partai tidak berperan. Dia ingin kesatuan

seperti [jaman Orde Baru]. Dia menginginkan bentuk pemerintahan Jawa. Saya tidak melihat adanya perbedaan yang benar-benar mencolok antara keduanya. Proyek-proyek yang dilakukan pemerintahan Soeharto tidak menandai keterpisahan antara Orla dan Orba. Tidak ada konstruksi ideologis internal yang khas ciptaan pemerintah Orde Baru.

Memang pemerintahan Orde Baru lebih birokratis. Jadi ada perbedaan. Tetapi pada hakikatnya tidak terjadi pemisahan pada titik tertentu. Jika kalian melihat sejarah, sesuatu berubah lebih cepat atau lebih lambat daripada yang lain. Saya menemukan adanya beberapa kemiripan antara Pare tahun 1980-an dan Pare pada tahun 1950an. Tidak berarti bahwa tidak ada perubahan di sana. Saya kira kalian harus mulai tidak saja dengan mengkritik ideologi Orde Baru melulu, yang relatif lebih mudah dilakukan, tetapi juga berusaha mendiskusikan beberapa alternatifnya. Kalian harus terbuka pada alternatif-alternatif yang mungkin dilaksanakan.

T: Apakah juga masih ada kemiripan antara periode Orde Baru dan periode pemerintah kolonial Belanda?

J: Saya tidak tahu secara persis. Tentu saja ada kemiripan. Birokratisasi sudah ada sebelumnya. Tetapi tidak mudah untuk menafsirkannya sebagai semata-mata regresi dari masa lalu. Kemiripan muncul karena kondisi yang serupa pula. Tetapi terlalu sederhana kalau kalian berpikir bahwa Orde Baru hanyalah semata-mata reinkarnasi dari masa kolonial.

Ikatan Primordial

T: Pak Cliff peneliti Indonesia yang pertama kali bicara tentang primordialisme. Dalam makalah “The integrative revolution: primordial sentiments and civil politics in the New States”, bab 10 buku IOC, Pak Cliff membahas sentimen primordial, yaitu hubungan darah, ras, bahasa, kedaerahan, agama, adat. Menurut Pak Cliff, unsur-unsur primordial itulah yang melatarbelakangi pemberontakan DI, PRRI/Permesta, dan juga pembunuhan massal 1965. Lalu Pak Cliff berpendapat bahwa ikatan primordial ⁸⁴ tetap ada—bahkan semakin mendalam—cuma sekarang itu tersembunyi: “At the moment, though tension between primordially defined groups, religious, regional, and ethnic,

remain intense, and in fact may have been deepened by the events of 1965, open expression of it is largely absent. That it will long remain so seems—to me at least—unlikely. (hlm. 283).

Diskusi tentang primordialisme ini sangat relevan dengan keresahan, kerusuhan dan kekerasan sekarang ini. Pertanyaan umumnya: „Apakah sifat-sifat primordial itu memang sudah “nasib“, atau hasil dari proses sejarah?“ Kalau sudah nasib, tidak banyak yang bisa dilakukan. Tetapi kalau hasil proses sejarah, itu bisa diubah.

J: Ledakan akibat benturan sentimen primordial memang lebih lambat daripada yang saya perkirakan. Tetapi primordialisme itu masih ada di sana, masih dalam, dan ekspresinya cukup terbuka. Tentu saja, seperti saya jelaskan dalam makalah itu, sifat-sifat primordial tersebut merupakan hasil proses sejarah. Ikatan primordial bukan urusan instink, bukan nasib. Tetapi terbentuk dalam proses waktu, seperti halnya dengan kesetiaan dalam persahabatan, keanggotaan politik dan sebagainya. Itu saya katakan secara eksplisit dalam tulisan saya.

Saya juga berbicara tentang modernisasi primordialisme, tentang revolusi di India dan di tempat-tempat lain. Yang dimaksud dengan “primordial” di sini adalah apa yang bagi orang yang bersangkutan sendiri merupakan hal yang penting. Sehingga mereka dapat berkata, “Sangat penting bagi saya bahwa saya seorang Islam, atau saya orang Jawa”. Itulah kesetiaan primordial yang terbentuk dalam proses waktu.

Sekarang ini banyak orang yang berpendapat bahwa kesetiaan primordial itu semata-mata masalah “contextual political circumstances”. Untuk menyanggah anggapan ini, apa yang terjadi di Srilanka, Yugoslavia, dan Burundi merupakan contoh kasus yang bagus. Di sana ada tribalisme yang sungguh-sungguh nyata, yang terbentuk sejak akhir masa kolonial. Kesetiaan primordial memiliki arti penting bagi mereka.

Dalam pembahasan mengenai primordialisme ini saya tidak begitu mempermasalahkan istilah. Yang penting idenya. Saya tidak mau menggunakan istilah “kesetiaan etnik” atau “kesetiaan linguistik”. Sebab kadang-kadang yang menonjol adalah ikatan agama, kadang-kadang kesukuan, kedaerahan, bahasa, dan kadang-kadang campuran dari semua itu. Maka yang saya

gunakan adalah istilah umum yang dapat mencakup semua kesetiaan tersebut.

T: Dengan pemahaman itu, bagaimana Pak Cliff memahami pemberontakan PRRI/Permesta pada akhir tahun 1950-an?

J: Ketika itu saya merencanakan untuk membandingkan tiga daerah, yaitu Minangkabau yang mayoritas penduduknya Islam, Minahasa yang mayoritas penduduknya Kristen, dan Bali yang mayoritas penduduknya Hindu. Pada waktu pemberontakan PRRI meletus saya berada di tempat kejadian, yaitu di Padang. Berkenaan dengan pemberontakan itu, menurut pendapat saya ada dua hal yang mengherankan.

Pertama, di satu pihak mereka menggunakan cara ekstrem, tetapi di lain pihak tuntutan yang mereka ajukan samasekali tidak radikal. Mereka hanya menginginkan pergantian kabinet, yaitu pergantian perdana menteri dan orang-orang yang duduk dalam kabinet. Biasanya, jika orang ingin memisahkan diri dari negara, yang diinginkan lebih dari itu. Dengan tuntutan pergantian kabinet tersebut mereka tidak menjabarkan visi apa pun tentang Indonesia. Mereka hanya menginginkan perubahan kebijakan. Mereka tidak ingin merubah seluruh struktur rejim.

Kedua, reaksi keras dari Sukarno. Pada waktu itu Sukarno baru saja kembali dari Tokyo. Saya masih ingat dia berkata, "Di sini saya berdiri. Jika kamu menginginkan perang, silakan!" Reaksi keras dari Sukarno ini sungguh-sungguh di luar dugaan.

Analisa pemberontakan PRRI/Permesta selama ini biasanya terlalu menekankan peranan campur tangan pihak luar. Saya sendiri melihat pemberontakan itu lebih karena masalah internal. Mereka yang melihat pemberontakan tersebut sebagai akibat campur tangan dari luar, menurut pendapat saya, terlalu mengabaikan dinamika internal dalam konteks Indonesia pada waktu itu. Segala sesuatu yang buruk di Indonesia dilihat sebagai akibat pengaruh luar. Saya kira tidak begitu. Meski pun saya setuju bahwa Amerika kerap kali membuat hal yang sudah buruk menjadi semakin buruk.

Ada juga kecenderungan untuk melihat Indonesia sebagai bentukan kolonial Belanda. Padahal kita harus melihat Indonesia sebagai pelaku. Mereka sendirilah yang membuat sejarah. Benar, bahwa Indonesia telah dijajah dan mendapat pengaruh luar. Waktu itu memang ada ketegangan internasional, dalam suasana Perang Dingin. Dalam buku George Kahin saya mendapat kesan bahwa hal-hal yang menimbulkan bahaya kehancuran itu merupakan hasil konspirasi dengan Amerika. Saya mengagumi George. Tetapi saya tidak setuju dengan pendapatnya yang terlalu menekankan peranan Amerika dalam pemberontakan PRRI/Permesta. Sebab banyak masalah internal yang terjadi.

T: Mengingat pemberontakan itu terjadi di luar Jawa atau dilakukan terutama oleh orang luar Jawa, faktor-faktor internal apa saja yang berpengaruh di situ?

J: Tadi kalian bertanya tentang pembredelan [pencabutan ijin terbit, *Ed.*] surat kabar. Waktu itu sebuah surat kabar dilarang terbit hanya karena memuat tanpa komentar di halaman muka sumber penghasilan ekspor Indonesia dan konsumsinya. Tentu saja orang Jawa lah yang paling banyak mengkonsumsi. Perasaan semacam itu pada waktu itu amat sangat kuat. Ada perasaan anti-Jawa. Masjumi sedang berjuang melawan kelompok kiri, yaitu nasionalisme radikal, karena program-program mereka yang mendapat dukungan luas. Ekonomi negara pada waktu itu sedang kacau. Banyak terjadi polarisasi. Hatta berperan penting dalam perlawanan terhadap dominasi Jawa, terhadap kelompok kiri, dan terhadap Sukarno. Apakah Hatta sendiri menyadari hal ini atau tidak, itu masalah lain. Tetapi dia menjadi simbol untuk perlawanan itu.

T: Apakah pemerintah Orde Baru menyangkal dinamika internal ini?

J: Ada ketakutan kalau menjurus ke disintegrasi dan meruntuhkan otoritas serta kekuasaan. Saya kira pemerintahan apa pun di Indonesia harus menghadapi dinamika internal. Cara menghadapinya memang tidak harus seperti model Orde Baru, yaitu dengan menyangkalnya atau menyelubunginya. Mengapa mereka melakukan itu? Karena kekuasaan

mereka berbasis pada fakta bahwa mereka harus melakukan itu. Akibatnya kekuasaan terpusat pada negara.

T: Di samping penjelasan politik apakah ada penjelasan budaya?

J: Masalahnya bukan menemukan kebudayaan pada pusatnya, seperti gotong royong dan sebagainya. Yang perlu dilihat adalah cara berpikir kebudayaan Jawa, kebudayaan suku bangsa lain, dan kebudayaan Indonesia. Bagaimana kebudayaan-kebudayaan itu bekerja, berinteraksi, dan pada tingkat mana itu semua berlaku. Pada fase-fase awal revolusi Minangkabau dan Sumatera pada umumnya sangat penting. Mereka kurang-lebih tersingkirkan pada masa Sukarno. Hatta dan orang-orang yang sejalan dengan dia tersingkir, kehilangan kekuasaan. Jadi kalian harus melihat ini semua kalau mau ²⁵ tahu apa yang terjadi pada waktu itu. Ada hal budaya yang perlu kalian perhatikan.

Saya ingat ketika di sana saya berbicara dengan dua koresponden Amerika, salah satunya dari majalah *Time*. Saya mencoba memberi sedikit penjelasan tentang masyarakat Minangkabau, masalah yang mereka hadapi, dan apa saja yang terjadi di sana. Tetapi kedua koresponden itu tidak menginginkan penjelasan tentang apa yang terjadi di sana. Mereka hanya ingin tahu tentang Hatta. Ini karena mereka hanya berkepentingan untuk memberi pelayanan politis.

Pada waktu itu amat sulit menemukan orang yang tidak membatasi diri pada pelayanan politis belaka, yaitu yang tertarik pada anatomi sosial-budaya dari masyarakat Minangkabau atau masyarakat lain. Saya kira kalian tidak bisa memahami apa yang kita bicarakan ini tanpa mengerti sejarah, kebudayaan dan sosiologi. Kalian harus menempatkan peristiwa yang terjadi di dalam konteks historis dan sosio-budaya. Cara untuk melakukan itu ada bermacam-macam. Saya memanfaatkan hampir seluruh hidup saya untuk mencoba melakukan itu.

3

Keterkaitan

T: Bagaimana Pak Cliff menjelaskan politik-kebudayaan-ideologi yang saling berhubungan itu dalam usaha “Membangun Bangsa”?

1

J: Dalam menganalisa suatu peristiwa saya tidak membuat pemilahan ke dalam faktor politik, kebudayaan, ideologi dan sebagainya. Saya cenderung melihat segala sesuatu sebagai sekaligus hal politik dan budaya pada saat yang bersamaan. Banyak peristiwa politik di Indonesia yang sekaligus juga merupakan persoalan budaya. Termasuk juga di sini masalah agama dan konflik antara suku bangsa. Ada kesatuan tak terpisahkan antara hal-hal politik, budaya, ekonomi dan sebagainya. Apa yang terjadi di Indonesia tidak bisa dipahami dari segi ekonomi saja.

Mengenai “Membangun Bangsa”, saya kira istilah itu sekarang sudah menjadi semacam slogan yang memiliki banyak isi tentang apa itu Indonesia, apa itu proyek bangsa dan negara Indonesia dan sebagainya. Masalahnya tidak lagi bagaimana menjadikan Indonesia sebagai kesatuan yang berfungsi.

T: John Pemberton mencoba menjelaskan bagaimana kebudayaan Jawa dipakai oleh pemerintah Orde Baru sebagai semacam politik kebudayaan untuk mengaburkan sifat-sifat otoriter dan kekerasannya. Bagaimana pendapat Pak Cliff mengenai hal ini?

J: Menurut saya penjelasan itu berat sebelah. Orde Lama dipisahkan secara tajam dari Orde Baru. Saya kira tidak begitu. Itu tidak salah, tetapi terlalu dangkal. Karena membuat politik kebudayaan begitu sederhana, membuat politik kebudayaan semata-mata sebagai alat. Seolah-olah pemerintah kolonial menyebabkan munculnya segala sesuatu di Indonesia dan kemudian itu dikembangkan selama Orde Baru. Seakan-akan kebudayaan politik Orde Baru hanyalah kebudayaan kolonial yang dihidupkan kembali. Ini penjelasan deterministik yang terlalu sederhana.

Penjelasan mengenai persoalan seperti ini tidak bisa diperoleh hanya berdasarkan semacam spekulasi abstrak. Untuk sampai pada kesimpulan yang memadai, kalian harus melakukan penelitian intensif, dalam periode yang lama, baik pada tingkat lokal maupun nasional. Harus benar-benar kerja, tidak hanya sekedar menyusun cerita-cerita berdasarkan bahan yang sudah ada. Sayang, sekarang ini penelitian empiris di tingkat lokal sangat merosot. Memang ada kekecualan pada sejumlah sarjana Amerika. Karya-karya tentang Bali dan Solo sangat bagus.

T: Pak Cliff menyatakan bahwa sekarang ini ide-ide kreatif masih terus muncul. Di samping versi-versi yang diciptakan negara, ideologi besar, atau hal lain, apa lagi yang sungguh-sungguh berusaha melakukan penyeragaman atau memaksakan diri pada masyarakat Indonesia? Dan bagaimana ide-ide itu disebarkan?

J: Saya sendiri tidak tahu persis tentang apa yang terjadi sekarang. Belum lama ini saya di Yogya. Saya melihat banyak macam sintesa antara Islam dan tradisi kecil Jawa yang masih berlangsung. Ini dapat dilihat di dalam lingkungan keagamaan, kebudayaan, sekolah-sekolah, dan aneka macam kelompok studi Javanologi. Masih terdapat banyak diskusi di sana. Ada juga ide-ide modern yang penting. Dalam pameran KIAS beberapa tahun yang lalu ada banyak ekspresi tentang apa yang terjadi sekarang. Kreativitas para pelukis dan penulis di Jakarta dan juga di tempat lain semakin berkembang. Saya kira orang tidak begitu saja menelan segala-sesuatu secara mentah-mentah. Mereka berpikir dan berdiskusi.

Dalam konteks religius, banyak kesempatan berdiskusi di kalangan Islam. Di dalam acara pengajian, yang tentu saja sangat sukar untuk dikontrol, orang dapat berbicara dan mengatakan apa yang ingin mereka katakan. Kesempatan semacam itu sekarang semakin banyak. Jadi banyak hal yang sekarang ini terjadi di luar apa yang direkayasa pemerintah pusat. Untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di tingkat lokal, kita memerlukan semakin banyak orang yang melakukan penelitian lapangan. Saya menemukan adanya banyak kreativitas di sana. Tetapi saya sendiri tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi.

T: Sebagai akhir wawancara, kami ingin tahu pertanyaan-pertanyaan macam apakah yang sebaiknya kami ajukan kepada Pak Cliff.

J: Saya kira, sebaiknya kalian mengajukan pertanyaan tentang masalah-masalah budaya dalam masyarakat Indonesia. Tetapi saya telah banyak menulis tentang hal itu. Saya pikir tidak ada yang baru. Kalian dapat bertanya sekitar peristiwa yang terjadi pada tahun 1950-an, waktu saya sendiri menjadi salah seorang pengamat di sana.

Sebetulnya saya sendiri ingin mengetahui lebih banyak tentang apa saja, termasuk masalah-masalah politik, yang akhir-akhir ini terjadi. Misalnya, saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di Situbondo secara lebih dalam. Tidak hanya apakah militer berdiri di balik peristiwa itu atau tidak. Mungkin militer memang berada di balik itu. Tetapi saya ingin tahu orang-orang yang terlibat di dalamnya, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, pandangan-pandangan mereka sendiri tentang apa yang mereka lakukan dsb. Ketegangan hubungan antara orang Islam dan orang Kristen atau Katolik tampaknya semakin hebat. Pada masa lalu tidak begitu. Sekarang tiba waktunya untuk melakukan apa yang telah kami lakukan pada tahun 1950an, untuk mengetahui apa yang berkembang dan bagaimana perkembangan itu berlangsung.

WE GREW UP TOGETHER

Usai mengedit transkripsi wawancara ini, Pak Cliff menyampaikan surat berikut untuk kita sekalian. Pesan yang hangat dari seorang ilmuwan tersohor:

I, too, much enjoyed the discussion we had. I am much less in touch with younger Indonesians, those whom I hope and trust will make their country's future, than I once was. It was good to sit around and "ngobrol" again. Whatever the value or validity of my views might or might not be, I hope I communicated my continuing deep concern for the welfare of Indonesia and of the Indonesian people. We "grew up together", myself and your country, and Indonesia is thus rather more than a mere object of knowledge for me.

The transcript, which I have read through, is very good, and I have only a very few minor comments.

That's it. You did a remarkably efficient and speedy job, and I wish I could still speak 'bahasa' as fluently as you make me sound, another reason I thought to go back to Indonesia for awhile.

Dengan segala hormat,

Clifford Geertz

MEMBANGUN REPUBLIK

Bercakap Tentang Sejarah Indonesia Bersama Sartono Kartodirdjo, Takashi Shiraishi, Benedict Anderson, George Kahin, Clifford Geertz, Daniel Lev, Goenawan Mohamad, dan Bill Liddle

Baskara T. Wardaya SJ (Editor)

Penyelaras akhir: Dyah Merta & Kevin Rinangga
Perancang Sampul: Teguh Prastowo
Perancang Isi: Teguh Prastowo

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Cetakan I, II, 2017

5 terbitkan oleh:

PENERBIT GALANGPRESS (Anggota IKAPI)
Jln. Mawar Tengah 72, Baciro, Yogyakarta 55225
Tel. (0274) 554985, 554986 Faks: (0274) 554985
Email: redaksi@galangpress.com
www.galangpress.com

Bekerjasama dengan:

Sanata Dharma University Press (SDUP), **PUSDEMA** (Pusat Kajian Demokrasi dan Hak-hak Asasi Manusia), dan **APPTI** (Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia)

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Wardaya, Baskara T.;

MEMBANGUN REPUBLIK: Bercakap Tentang Sejarah Indonesia Bersama Sartono Kartodirdjo, Takashi Shiraishi, Benedict Anderson, George Kahin, Clifford Geertz, Daniel Lev, Goenawan Mohamad, dan Bill Liddle
Yogyakarta: Galangpress bekerjasama dengan SDUP, PUSDEMA, APPTI
Cet. II, 2017; 155x230 mm; xxviii+268 hal.
ISBN: 978-602-8174-19-0

I. Sejarah Politik

II. Judul

III. Wardaya, Baskara T.

Buku ini pernah diterbitkan dengan judul *Mencari Demokrasi* (979-8933-17-6) oleh Institut Studi Arus Informasi, Mei 1999.

Dicetak oleh:

PEKERJA TAKAN GALANGPRESS
Jln. Mawar Tengah 72, Yogyakarta 55225
Telp. (0274) 554985, 554986. Fax: (0274) 554985
Email: produksi@galangpress.com,
www.galangpress.com